

**ANALISIS YURIDIS PENUNTUTAN PENGEMBALIAN
MAHAR AKIBAT PERCERAIAN
(PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
NOMOR: 15/PDT.G/2011/MS-ACEH)**

YANTI JULIA

ABSTRACT

Divorce occurs, it will cause legal consequence on those who are related to a household. The husband or the wife who feels inconvenient will claim his/her rights such as the right to bring up the child, to divide joint property, and sometimes to claim the return of dowry to the ex-wife. The obligation to pay for a dowry is based on some reasons: judicial reason can be seen in the Koran, An-Nisa:4, 20, 24, and 25, Al-Hadis, Ijtihat, and in KHI (the Compilation of Islamic Laws) it is regulated in Article 30; it can also viewed from historical reason, philosophical reason, and sociological reason. In the Islamic law, a dowry which has been given to a future wife will belong to her and cannot be claimed anymore. Nevertheless, a dowry can be claimed by the ex-husband if the divorce is without any reason and in the request of and the fault of the ex-wife. Panel of judges also consider that the return of the dowry because of a divorce is the form of justice for a husband who is claimed for a divorce by his wife without any reason.

Keywords: *Judicial Analysis, Divorce, Dowry*

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan itu diperlukan adanya cinta lahir bathin antara pasangan suami istri tersebut. Dalam sebuah perkawinan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Hal ini juga sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Hal ini nampaknya memang mengkekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat dan inilah yang sedang mengalami proses perubahan dalam lingkup yang luas

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih memperbaiki diri pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.¹

Mengenai putusan perkawinan akibat perceraian ini diatur dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, dengan dasar bahwa perceraian dapat dilaksanakan bagi suami istri. “Walaupun perceraian itu adalah malapetaka, tetapi suatu malapetaka itu tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya, perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.”²

Dalam perkembangannya, perceraian terjadi tidak hanya karena kemauan suami (cerai talak), tetapi banyak juga terjadi karena permintaan isteri (cerai gugat). Banyak alasan yang dikemukakan isteri untuk menggugat cerai kepada suaminya misalnya, adanya kekerasan dalam rumah tangga, ataupun seringnya terjadi pertengkaran yang pada akhirnya melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa setiap pasangan tidak selamanya dapat menyelesaikan konflik-konflik yang mereka alami, sehingga menempuh upaya hukum yang ada untuk menyelesaikannya.

Apabila perceraian ini terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga. Salah satu dari pasangan pasti akan merasa dirugikan. Berbagai reaksi pun akan terjadi dari pihak yang merasa dirugikan, mulai dari perebutan hak asuh anak, penuntutan pembagian harta bersama (*gono-gini*), bahkan sampai ada penuntutan pengembalian mahar oleh suami terhadap isterinya.

¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 30.

² *Ibid*, hal. 12.

Kalau dilihat dari segi hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada isteri adalah menjadi hak milik isteri. Seorang suami tidak boleh menuntut kembali mahar yang telah diberikan apabila isterinya tersebut telah digaulinya, namun pada kenyataannya ada suami yang menuntut kembali pengembalian mahar tersebut karena merasa tidak ada alasan yang kuat bagi isterinya untuk menggugat cerai. Menurut ketentuan hukum Islam, mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, namun semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan.

Salah satu kewajiban suami dalam perkawinan adalah membayar mahar. Mahar merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan perkawinan. Kedudukan mahar adalah sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S. An-nisa ayat 4: *“Berikanlah maskawin (shadaq, nihilah), sebagai pemberian yang wajib. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai maskawin itu senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”*.³

Mahar atau maskawin adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang isteri dalam kaitannya dengan perkawinan.⁴ Mahar yang diberikan oleh suami kepada istri dalam bentuk apapun semata-mata menjadi miliknya istri, kecuali istri bersedia memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya maka pemberian tersebut hanya merupakan sekedar kebaikan hati istri kepada suaminya.

Di dalam hukum Islam, mahar adalah wajib bagi laki-laki, akan tetapi tidak menjadi rukun nikah. Apabila ditinjau dari segi besarnya mahar yang harus dibayar oleh suami, maka terdapat dua pembagian mahar, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati kedua belah pihak. Mahar ini dapat dibayar secara tunai bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri. Sedangkan mahar mitsil atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan,

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 10.

⁴ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 71

tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan isteri dan kemampuan serta kedudukan suami.

Dalam kenyataan di masyarakat mahar dapat berupa uang, pakaian, benda bergerak atau tidak bergerak, bahkan bisa dalam bentuk pelayanan tertentu kepada isterinya seperti suami memberikan mahar dalam bentuk mengajarkan ngaji Al-Qur'an kepada istrinya dan lain sebagainya.

Mengenai penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian, kasus ini pernah terjadi di Provinsi Aceh yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tahun 2011, yaitu Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh. Penuntutan pengembalian mahar merupakan suatu permasalahan yang ada dalam suatu perkawinan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang merugikan pihak isteri karena harus mengembalikan sesuatu benda/barang yang telah menjadi haknya. Sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui apa yang salah dalam hal ini.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah yang melatarbelakangi kewajiban pemberian mahar dari calon suami kepada calon isteri dalam perkawinan Islam?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang kewajiban pemberian mahar dari calon suami kepada calon isteri dalam perkawinan Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh.

II. Metode Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder
yaitu “semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku dan karya ilmiah”⁵
- c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, artikel, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Wawancara dengan informan yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Dalam melakukan penelitian lapangan ini dipergunakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam (*indept interview*) secara langsung yaitu kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 141.

Aceh. Hasil wawancara yang dilakukan ini digunakan untuk mendukung data sekunder.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

A. Kewajiban Pemberian Mahar dari Calon Suami kepada Calon Isteri dalam Perkawinan Islam.

1. Alasan Yuridis.

Kewajiban berlakunya membayar mahar, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan pada waktu akad nikah. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang diantara suami isteri terjadi sebelum *dukhol*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan pada waktu akad.

Berlakunya kewajiban pemberian mahar ini dapat ditelaah dari beberapa aspek, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an.

Menurut Al-Quran kewajiban pemberian mahar dari seorang suami kepada isterinya, terdapat dalam firman Allah dalam surat An-nisa ayat 4: *“Berikanlah maskawin (shadaq, nihilah), sebagai pemberian yang wajib .kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai maskawin itu senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”*.⁶ Dalam surat An-nisa ayat 4 juga disebutkan *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”*. Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan. Demikian juga seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 20 *“Dan kamu telah memberikan kepada mereka harta yang banyak (maskawin)”*.⁷

Surat An-Nisa ayat 24 juga Allah berfirman: *“wanita-wanita yang telah kamu campuri, hendaklah kamu berikan ujah (maskawin) sebagai suatu kewajiban”* dan

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Loc. Cit.

⁷ H. Rahmat Hakim, *Op. Cit*, hal. 72.

masih dalam ayat 24 juga ditegaskan “*Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina*” dan dalam ayat 25 disebutkan bahwa “*Dan berilah mereka maskawin yang pantas*”.⁸

b. Al-Hadis.

Mengenai kewajiban mahar, terdapat beberapa Al-Hadis yang menyebutkan kewajiban pembayaran mahar dari seorang suami kepada isterinya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa’ad al-Sa’adiy dalam bentuk *muttafaq alaih*, yaitu: “*Nabi berkata: Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Quran?, Ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya. Nabi berkata: Kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?, dia menjawab: Ya. Nabi berkata: Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran*”.⁹

Hadis lainnya adalah Nabi sendiri pada waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian dia menjadi ummu al-mukminin. Hal ini terdapat dalam hadis dari Anas r.a. yang *muttafaq alaih* ucapan Anas: “*Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, telah memerdekakan sofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (waktu kemudian mengawininya)*”¹⁰

c. Ijtihad.

Mahar hukumnya adalah wajib atas laki-laki dan bukan atas perempuan. Beberapa mazhab mempunyai pendapat yang berbeda dengan kewajiban pemberian mahar. Seperti yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali bahwa pertama, sekedar akad yang sah bisa jadi hilang keseluruhannya atau setengahnya, selama ditegaskan dengan hubungan persetubuhan atau kematian atau dengan khalwat. Kedua, persetubuhan itu yang bersifat hakiki sebagaimana halnya kondisi persetubuhan yang dilakukan dengan syubhat, atau dalam perkawinan yang fasid. Dalam kondisi yang seperti ini mahar tidak jatuh kecuali dengan pelunasan atau

⁸ *Ibid.*

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 3, 2009), hal. 92.

¹⁰ *Ibid.*

dengan pembebasan.¹¹ Ulama Hanafi dan Hambali juga berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari khalwah, meskipun belum berlaku hubungan suami isteri. Khalwah itu oleh ulama Hanafi statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami isteri. Ulama Hanafi juga menambahkan satu syarat, yaitu berlangsungnya *talaq bain*, walaupun belum berlangsung hubungan suami isteri. Dan ulama Hambali menambahkan semenjak bersentuhan dengan bernaafsu antara suami isteri telah wajib membayar mahar keseluruhannya.

Ulama Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Sementara ulama Maliki mengatakan bahwa mahar sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.¹² Ulama Maliki menambahkan satu syarat yaitu isteri telah serumah dengan suaminya selama satu tahun.

d. Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai kewajiban mahar diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang mahar ini, diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar disepakati sebelum akad perkawinan. Jadi ada pengompromian antara kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan.

Kewajiban menyerahkan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 30, disebutkan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak", dan dalam pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa "Penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai" dan ayat 2 disebutkan "Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria". Dalam pasal 33 ini, mahar terkesan dalam bentuk materi (benda).

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 230.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 4, 2010), hal 85.

2. Alasan Sejarah.

Dari segi sejarah, pada masa jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernapas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati, kemudian Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita).

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian maskawin dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan.

3. Alasan Filosofi.

Islam mengatur mengenai pemberian sesuatu terhadap istri. Biasanya ini dikenal dengan mahar yaitu pemberian berupa barang (harta benda) bergerak ataupun benda tak bergerak yang diberikan oleh suami kepada sang istri¹³. Meskipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon isteri merasa dilecehkan atau disepelkan. Hal ini dimaksudkan supaya ada keseimbangan antara keluarga calon isteri dan keluarga calon suami.

Pembayaran mahar sepatutnya berupa sesuatu yang memiliki nilai sekalipun mungkin ia kecil atau bahkan sangat berharga. Sekalipun maskawin itu tidak

¹³ <http://qolbifsh.blogspot.com/2012/04/bab-i-pendahuluan-secara-garis-besar.html>, diakses tgl 12 juni 2013.

diberikan segera, namun ia tidak boleh ditunda dengan janji yang mengambang. Pada umumnya dalam rumah tangga pasti terdapat krikil tajam yang suatu saat bisa menghantuinya. Sehingga jalan satu-satunya dalam penyelesaiannya adalah talak. Untuk menyikapi hal itu, di sinilah peran aturan mengenai maskawin. Di mana pemberian maskawin akan menghalangi seseorang untuk cepat-cepat menjatuhkan talak.¹⁴

Oleh sebab itu, posisi maskawin dalam perkawinan memiliki nilai filosofisnya yaitu sebagai pemberian rasa takut terhadap sikap pengambilan talak secara cepat, sehingga keberlangsungan bahtera rumah tangga tetap terjaga. Selain itu juga, maskawin memiliki nilai filosofis yaitu sebagai penunjukan kecintaan sang laki-laki terhadap wanitanya.

4. Alasan Sosiologi.

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima peluang ilmu pengetahuan. Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.¹⁵

Pada dasarnya mahar merupakan salah satu syari'at dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya (salah satunya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim), syari'at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam pernikahan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Mengenai mahar di Aceh, nilai mahar di Aceh merupakan simbol kehormatan dan gengsi keluarga baik dari pihak wanita maupun

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal 39.

pihak lelaki. Bagi pihak wanita, tingginya nilai mahar menunjukkan kedudukan sosial keluarga wanita tersebut.

Nilai mahar ini dapat berubah disesuaikan dengan status sosial keluarga wanita dimana nilai mahar ini ditentukan oleh pihak keluarga wanita. Tingkat pendidikan yang dienyam, kemampuan ekonomi, keturunan kebangsawanan, dan kecantikan paras menjadi variabel berubahnya nilai mahar si wanita. Makin tinggi tingkatan variabel yang disebutkan di atas yang dimiliki oleh seorang wanita, maka akan semakin tinggi nilai mahar yang ditetapkan oleh keluarganya.

Mahar sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan, strata sosial serta paras dari mempelai wanita, mahar juga berpengaruh dengan kultur budaya lokal. Dan yang terjadi di Aceh adalah, patokan mahar yang semakin tinggi seakan menjadi sebuah prestasi.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Seorang Suami Melakukan Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian.

Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan di benci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau isteri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁶ Perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan perkara perceraian, layak atau tidak perceraian tersebut dilaksanakan.

Seorang suami atau isteri yang menuntut perceraian di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh isteri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 181.

perceraianya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan, maka suami atau isteri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Perceraian tidak dilarang oleh Undang-undang Perkawinan, tetapi haruslah dipersukar, maka mestilah perceraian dilakukan didepan pengadilan dengan melauai prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan.¹⁷

Perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar sangat jarang terjadi. Mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya.¹⁸ Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menyediakan sesuatu melalui mahar yang diberikan kepadanya, demikian juga sebagian atau seluruh dari hartanya sendiri. Mahar adalah miliknya secara keseluruhan, dimana ia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya.¹⁹

Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum bercampur atau *qabla dukhul*, jika dalam hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Apabila perceraian itu terjadi dengan fasakh dari pihak isteri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Maka dalam hal ini, karena kejahatan datangnya dari pihak wanita itu sendiri maka gugurlah semua maharnya, sebab maksiat itu yang menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi hak isterinya itu.
2. Fasakh yang dilakukan oleh suami atau isteri setelah mereka akil baliqh, sedangkan mereka dikawinkan ketika mereka masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena bercampur atau dukhul tidak terjadi antara suami isteri tersebut.

¹⁷ Rusdi Malik, *Memahami Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hal 31.

¹⁸ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 101.

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, dengan penerjemah Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan 4, 2010), hal. 439.

²⁰ <http://Indonesianschool.org>, Artikel, Aep Saepullah Darusnanwiati, "Mahar, resepsi dan adab malam pengantin menurut petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah", diakses pada tanggal 20 Agustus 2013.

3. Fasakh karena tidak sekufu', yaitu wali memintakan fasakh karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar mitsil, fasakh seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga. Apalagi jika fasakh ini datangnya dari pihak isteri, maka maharnya menjadi gugur karena tidak ada sesuatu sebab yang mengharuskan suami membayarnya.
4. Juga ketika si isteri membebaskan atau menghibahkan kepada si suami dari pada mahar tersebut.

Alasan suami meminta pengembalian mahar kepada isterinya dalam kasus diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh adalah disebabkan suami merasa dirugikan karena suami merasa tidak melakukan satu kesalahan apapun, dan selama dalam masa pernikahan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga merasa kecewa ketika isterinya menggugat cerai tanpa alasan yang jelas, sedangkan suami masih ingin mempertahankan rumah tangga.

Alasan lainnya adalah suami juga kecewa terhadap isterinya karena isterinya sudah tidak mau melayaninya lagi (dalam hal hubungan suami isteri), suami juga menganggap bahwa perceraian tersebut terjadi atas keinginan dari isteri sendiri, sehingga suami merasa pantas untuk meminta kembali mahar yang diberikan kepada isterinya, sebagai bentuk keadilan atas perbuatan/kesalahan yang tidak dilakukannya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengadili Perkara Perceraian dengan Penuntutan Pengembalian Mahar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh.

Mengenai Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh, Majelis Hakim memutuskan khuluk, yang menjadi dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan

oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang aniaya”.

Dasar hukum lainnya adalah hadis yang dikemukakan oleh Al-Shan’ani bahwa isteri Tsabit bin Qais yang bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah SAW bahwa ia ingin bercerai dengan Tsabit bin Qais, padahal Tsabit bin Qais tidak punya kesalahan sama sekali kepada isterinya. Lalu Rasulullah memerintahkan isteri Tsabit agar mengembalikan maskawinnya berupa kebun.

Hukum asal khuluk ada yang berpendapat dilarang (haram), ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram kecuali karena darurat. Ulama Syafi’i berpendapat bahwa hukum asal melakukan khuluk itu makruh, hanya dia menjadi sunat hukumnya bila isteri ternyata tidak baik dalam bergaul terhadap suaminya. Status perceraian karena khuluk yaitu bahwa bila suami telah melakukan khuluk terhadap isterinya, maka dengan khuluk itu bekas isteri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali sebab isteri telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya itu.

Kasus ini berawal dari cerai gugat yang diajukan oleh isteri untuk menggugat cerai suaminya ke pengadilan, pada pengadilan tingkat pertama, gugatan isteri dikabulkan oleh majelis hakim, dan menolak tuntutan suami yang meminta pengembalian mahar. Selanjutnya karena merasa tidak adil maka suami mengajukan banding. Pada pengadilan tingkat banding ini tuntutan suami dikabulkan Majelis Hakim, dan memberi putusan cerai khuluk kepada si isteri. Dalam hal khuluk, seharusnya ada kesepakatan antara suami dan isteri untuk melakukan khuluk, dimana isteri bersedia memberi tebusan dan disetujui oleh suaminya. Namun dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa kesalahan berasal dari isteri dimana suami yang masih ingin mempertahankan kerukunan rumah tangga tetapi isteri sudah tidak mau melayani suaminya lagi serta istri sendiri yang bersungguh-sungguh ingin bercerai dari suaminya.

Putusan majelis hakim dalam kasus ini bukan khuluk murni, karena kasus ini adalah cerai gugat yang diajukan oleh isteri. Pada dasarnya khuluk merupakan

perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* dan atas persetujuan suaminya. Dasar hukum khuluk adalah surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya *“jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa keduanya tentang pembayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”*.

Sementara dalam kasus ini isteri keberatan/tidak mau memberikan tebusan ataupun mengembalikan mahar yang telah diterimanya dan juga tidak adanya persetujuan/kesepakatan untuk melakukan perceraian. Ulama Syafi’i, Hanafi dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa khuluk itu sah dilakukan meski isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan khuluk itu sah dengan saling kerelaan antara suami isteri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja.²¹

IV. Kesimpulan dan Saran.

A. Kesimpulan

1. Kewajiban pemberian mahar dari seorang calon suami kepada calon isteri yang melatarbelakanginya, yaitu:

Pertama alasan yuridis, berdasarkan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 4, ayat 20, ayat 24 dan ayat 25, dalam Al-Hadis juga ada beberapa hadis yang menyebutkan kewajiban pembayaran mahar, seperti yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa’ad al-Sa’adiy, yang menyatakan mengajarkan Al-Qur’an sebagai mahar, hadis lainnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Anas r.a, yang menyatakan kemerdekaan Sofiah sebagai mahar ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, dan berdasarkan Ijtihad, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang kewajiban mahar, ulama Hanafi dan Hambali berpendapat kewajiban mahar itu dimulai dari khalwah, meskipun belum terjadi hubungan suami isteri, ulama Syafi’i mengatakan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada perempuan untuk menguasai seluruh anggota badannya, sementara ulama Maliki mengatakan bahwa mahar sebagai rukun nikah dan hukumnya adalah wajib, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, mengenai kewajiban memberikan mahar diatur dalam pasal 30.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hal 223.

Kedua alasan sejarah, pada zaman jahiliyah hak-hak perempuan telah dihilangkan dan disia-siakan, sehingga diwajibkannya pemberian mahar jika hendak menikahi seorang perempuan dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan.

Ketiga Alasan filosofi, pembayaran maskawin/mahar tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan, walaupun hukumnya adalah wajib, artinya harus sesuai dengan kemampuan suami.

Keempat Alasan sosiologis, mengenai maskawin/mahar dalam masyarakat Aceh merupakan simbol kehormatan yang menunjukkan kedudukan sosial suatu keluarga, hukumnya wajib ada namun bentuk dan jumlahnya ditentukan secara adat yang berlaku di Aceh.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian maskawin akibat perceraian adalah bahwa, suami merasa dirugikan ketika isteri menggugat cerai tanpa alasan yang jelas, dan suami masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga serta suami merasa kecewa karena isterinya sudah tidak mau melayaninya lagi (dalam hal hubungan suami isteri).
3. Dalam perkara penuntutan pengembalian maskawin berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh, bahwa pada Pengadilan tingkat pertama (Mahkamah Syar'yah Jantho) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan untuk dikembalikannya maskawin tidak berdasarkan hukum karena dalam hukum Islam seorang suami baru boleh meminta pengembalian maskawin bila terjadi perceraian, isterinya tersebut menuntut cerai dan belum terjadi dukhul, sementara pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dukhul. Selanjutnya pada Pengadilan tingkat banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh), pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah bahwa pengembalian mahar tersebut tidak didasarkan kepada sudah atau belum terjadinya dukhul, melainkan kepada isteri yang benar- benar ingin bercerai dengan suaminya

tanpa alasan yang jelas, karena suami tidak melakukan kesalahan apapun dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyesuaian antara hukum Islam dengan adat dalam penentuan mahar, dimana dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijtihad maupun dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa mahar wajib diberikan kepada calon isteri namun harus sesuai dengan kemampuan calon suami, namun ketentuan adat yang menentukan mahar terlalu tinggi kadangkala tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, sehingga masyarakat lebih memakai adat sebagai patokan penentuan mahar dari pada hukum Islam.
2. Supaya tidak menimbulkan permasalahan seperti ini dalam perceraian sebaiknya pasangan suami isteri bisa lebih saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya, dan tidak gegabah atau sembarangan dalam mengambil keputusan dalam hal perceraian, sehingga seandainya terjadi perceraian tidak harus ada penuntutan pengembalian mahar.
3. Sebaiknya dalam putusan perkara ini seharusnya Hakim lebih mempertimbangkan juga hak dan kerugian yang diterima atau dialami oleh isteri, karena dalam hal ini isteri telah kehilangan haknya yaitu mahar yang merupakan lambang kehormatan dirinya dan yang mengangkat derajat kaum wanita ke atas kedudukan sosial dalam masyarakat.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 4, 2010
- Hakim, H. Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan, Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004

- Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Malik, Rusdi, *Memahami Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan 1, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Muhammad, Rusjdi Ali, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011
- Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil, dengan penerjemah Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan 4, 2010
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 3, 2009

B. Website

[bab-i-pendahuluan-secara-garis-besar.html](http://qolbifsh.blogspot.com/2012/04/bab-i-pendahuluan-secara-garis-besar.html), <http://qolbifsh.blogspot.com/2012/04/>, diakses tgl 12 juni 2013

Aep Saepullah Darusnanwiati, Artikel “*Mahar, resepsi dan adab malam pengantin menurut petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah*”, <http://Indonesianschool.org>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.